

Sekilas Krisis Finansial Global

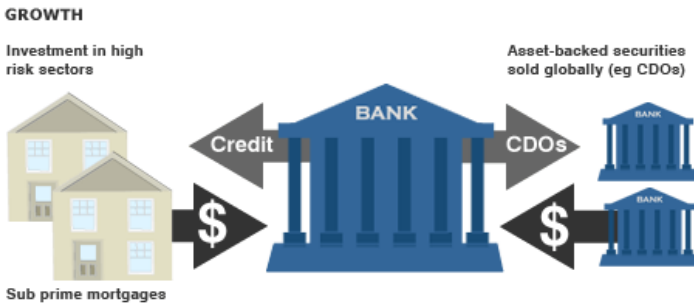
Sebagai pemimpin geopolitik global, Amerika Serikat akhirnya bertekuk lutut juga. Bukan gara-gara serangan militer atau infiltrasi pasukan asing. Bukan pula akibat kalah bersaingnya produk *made in USA* dengan Cina atau Jepang. Kehancuran sektor keuangannya dipicu perilaku warga dan para bankirnya yang sepertinya kepincut dengan pesona ekonomi kapitalis.

Booming kredit perumahan di sana ternyata tidak seindah properti mewah yang pembiayaannya menyedot kredit dari perbankan. Padahal pasokan kredit tersebut jelas ada ongkosnya. Menurut berita dari BBC, “*Between 2004 and 2006 US interest rates rose from 1% to 5.35%, triggering a slowdown in the US housing market.*” Kredit itu pun lambat tapi pasti membuat para debitur bank tak sanggup membayar. Pada 19 Juli 2007, bos *the Fed Ben Bernanke* pun mengingatkan bahwa kerugian dari kredit perumahan tersebut bisa mencapai USD 100 miliar. Singkat kata, akhirnya *mortgage loan* mengalami *credit crunch* menjadi pemicu utama krisis finansial di Amerika Serikat.

Jeratan kredit macet di tangan kiri—atau sisi penggunaan dana bank (*use of fund*)—membuat bank akhirnya tidak

bisa membayar kewajibannya melalui tangan kanan—atau sumber dana bank (*source of fund*). Ketika tangan kanan bank yang sedang sakit tersebut bergandengan dengan tangan kiri kreditur atau yang memasok dana ke bank, maka para kreditur bank pun terkontaminasi penyakit pula. Akhirnya institusi keuangan yang saling bergandengan tangan tersebut sama-sama lumpuh. Itulah fenomena efek domino yang akhirnya membuat krisis keuangan pun “go international” atau mengglobal.

Hebatnya, *mortgage loan* ke masyarakat tersebut diutak-atik oleh bank pemberi kreditnya menjadi semacam instrumen keuangan yang dijual lagi ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Portofolio keuangan berupa CDO (*Collateralised Debt Obligations*) tersebut menyebar melalui “jalanan tangan kanan dan kiri” di sistem keuangan global.



Gambar 1. Saat kredit rumah diperjualbelikan kembali (sumber: <http://news.bbc.co.uk>)

Itulah ekonomi kapitalis yang memungkinkan instrumen keuangan bisa beranak pinak. Instrumen turunan itu pun

rela dibeli masyarakat atau lembaga keuangan. Ketika *mortgage loan* sebagai biangnya mengalami penyakit akut, maka anak dan keturunannya—kita sebut sebagai derivatif—pun terjangkau penyakit. Justru efek domino dan penyebaran derivatif itulah yang membuat krisis finansial tereskalasi secara global. Kata Michael D. Bordo: *“Defaults on mortgages spread to investment banks and commercial banks in the U.S. and across the world via an elaborate network of derivatives.”*

BLBI “Made in USA”

Indonesia punya pengalaman pahit dengan krisis moneter yang berimbas pada krisis multidimensi mulai tahun 1998. Ternyata Amerika Serikat seolah “berguru” ke Indonesia juga. Pemerintah AS mengikuti langkah Indonesia ketika harus menalangi imbas krisis keuangan di negeri Paman Sam yang dimulai dengan kredit macet di sektor properti. Uang sebesar US\$ 900 miliar pun digelontorkan pemerintah AS untuk menyelamatkan sektor keuangan yang rontok karena terkena efek berantai dari kemacetan kredit properti.

Inilah BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) dengan sentuhan pemegang hegemoni keuangan global, dan “BPPN” versi Paman Sam pun dibentuk untuk mengelola aset lembaga keuangan yang akhirnya dikuasai pemerintah AS. Benar-benar “kisah yang mirip” dengan gonjang-ganjing di Indonesia mulai 1997. Pasar Modal Indonesia sebenarnya terkaget-kaget juga dengan kejadian di AS tersebut. Buktinya adalah indeks harga sempat turun drastis, sampai sempat ditutup perdagangan sahamnya.

Pemerintah pun bersedia menyediakan dana pinjaman sebesar 4 triliun untuk BUMN yang mencoba melakukan

“buy back” saham-sahamnya yang ditransaksikan di pasar modal. Syukur-syukur akhirnya para investor domestik atau BUMN dan pemerintah RI akhirnya menjadi pemegang saham mayoritas lagi di beberapa BUMN strategis yang saat ini malah semakin dikuasai oleh pihak asing.

Saya pun teringat dengan tulisan saya sebelumnya dalam buku *Banking on The Blog*. Saya kutip lagi beberapa penggalan dalam tulisan tersebut:

“Bom waktu perbankan pun akhirnya meledak, dan tidak tanggung-tanggung dampak letusannya terhadap perekonomian Indonesia. Pada November 1997 sejumlah bank mulai rontok yang diawali dengan ditutupnya 16 bank yang akhirnya menyeret Indonesia ke krisis moneter yang tak terlupakan dalam sejarah perekonomian Indonesia.”

“Pada tahun 1998 dibentuk BPPN sebagai lembaga yang berusaha untuk menyelamatkan wajah perbankan Indonesia. BPPN lahir sebagai salah satu butir dalam serangkaian *Letter of Intent* (LOI) antara pemerintah Indonesia dengan IMF, dengan LOI pertamanya ditandatangani pada 1 November 1997. Pembentukan BPPN ini dianggap sebagai awal proses rehabilitasi terhadap industri perbankan. Pada tahun 1988, dari 55 bank yang dirawat oleh BPPN ternyata 10 bank tidak tertolong (dilikuidasi), 4 bank harus masuk unit gawat darurat (direkapitalisasi), dan sisanya masih terus dirawat intensif. Pada Maret 1999 38 bank kembali tak tertolong, 9 bank direkapitalisasi, dan 7 bank diambil alih. Program rehabilitasi ternyata memakan korban yang banyak dengan biaya rehabilitasi yang tidak sedikit, yaitu sekitar 439 triliun (Pangestu dan Habir, 2003), termasuk meminta bantuan asing yang dikapteni oleh IMF. Inikah buah pahit atau hukuman terhadap rendahnya integritas perbankan?”

“Memang sebuah perjalanan yang sangat pahit dan mahal. Andaikan biaya rehabilitasi yang lebih dari 400 triliun tersebut digunakan untuk membangun rumah

yang porak poranda digoyang gempa Yogya pada tanggal 27 Mei 2006. Untuk bantuan gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa tengah, biaya sebesar itu akan bisa membangun 13 juta lebih rumah sederhana dengan ukuran 40 meter persegi yang dihargai dengan bantuan pemerintah sebesar Rp 30.000.000,-. Jika setiap rumah tersebut dihuni oleh keluarga inti sebanyak 4 orang, maka rumah sebanyak itu akan menjadi tempat berteduh yang nyaman untuk 52 juta penduduk Indonesia.”

Itulah harga BLBI *made in* Indonesia. Nah, BLBI *made in* USA dalam nilai rupiah adalah sebesar Rp 9.000.000.000.000.000 atau 9.000 triliun rupiah. Angka nol dalam denominasi rupiah pun sampai berderet sebanyak 15 digit. Angka itu diperoleh dengan mengalikan *bail-out* sebesar US\$ 900 miliar dengan kurs Rp 10 ribu/dolar. Batas psikologis nilai tukar tersebut sempat tersentuh.

Kepanikan sempat menyeruak di pasar uang di Indonesia juga. Nilai dana talangan “*made in* USA” tersebut 22,5 kali dari BLBI yang dikeluarkan BI pada tahun 1998. Pantas seluruh dunia ikut gonjang-ganjing. Kini imbasnya malah sudah menjalar ke wilayah Eropa.

BI Mulai Bersiasat

Saya masih ingat ketika membuka kuliah pertama Manajemen Dana Bank di program magister pada tanggal 13 Oktober 2008 dengan kalimat pembuka, “Krisis keuangan di AS menjadi topik yang menarik untuk hari ini.”

Beberapa mahasiswa pun mulai mengangguk-angguk. Saya tidak tahu apakah mereka menyimak dan antusias dengan topik tersebut, atau sekadar gerakan untuk mengusir rasa ngantuk. Saya pun meneruskan kalimatnya, “Tunggulah

beberapa hari ke depan, BI pasti mengeluarkan kebijakan baru terkait dengan krisis tersebut.”

Ketika saya pulang dari mengajar hari ini untuk pertemuan kedua dengan mereka, saya pun iseng melihat *website* BI dan terpampanglah *press release* yang dirilis tanggal 14 Oktober 2008 dengan redaksi selengkapnyanya berikut ini.

No.10/47/PSHM/Humas

Mencermati gejala ekonomi dan keuangan global yang sedang berjalan, Bank Indonesia mengambil langkah-langkah yang menjaga kecukupan likuiditas valuta asing dan rupiah di dalam negeri. Langkah-langkah tersebut mencakup:

1. Perpanjangan tenor FX *Swap* dari paling lama 7 hari menjadi sampai 1 bulan (berlaku sejak 15 Oktober 2008). Langkah ini untuk memenuhi permintaan valuta USD yang sifatnya temporer sehingga memberi waktu penyesuaian yang cukup bagi bank/pelaku pasar sebelum benar-benar melakukan penyesuaian komposisi portofolionya.
2. Penyediaan pasokan valuta asing bagi perusahaan domestik melalui perbankan (berlaku sejak 15 Oktober 2008), untuk meningkatkan kepastian pemenuhan kebutuhan valuta asing perusahaan domestik.
3. Penurunan rasio GWM valuta asing untuk bank umum konvensional dan syariah dari 3,0% menjadi 1,0% (berlaku sejak 13 Oktober 2008) untuk menambah ketersediaan likuiditas valuta USD yang dapat digunakan bank dalam bertransaksi dengan nasabahnya.
4. Pencabutan ketentuan pasal 4 PBI No. 7/1/PBI/2005 tentang batasan posisi saldo harian Pinjaman Luar Negeri jangka pendek dengan meniadakan batasan posisi saldo harian Pinjaman Luar Negeri jangka pendek (berlaku sejak 13 Oktober 2008). Langkah ini ditujukan untuk mengurangi tekanan pembelian USD karena adanya pengalihan rekening rupiah ke valuta asing oleh nasabah asing.

5. Penyederhanaan perhitungan GWM rupiah (berlaku sejak 24 Oktober 2008) menjadi hanya dalam bentuk *statutory reserves* sebesar 7,5% dari DPK agar likuiditas rupiah dalam sistem perbankan menjadi lebih memadai.

Kini empat tahun sudah berlalu, apakah perbankan Indonesia, termasuk Bank Indonesia, mulai terkena imbas krisis finansial global? Mari kita simak geliat dan siasatnya sepanjang tahun 2011 pada tulisan-tulisan di buku ini.

Ayo Menyumbang ke Bank

“KPPU Monitor Suku Bunga Kredit Bank”, “Empat Bank BUMN Raup Laba Rp 22 Triliun”, “Bank RI Keruk Untung Bunga Paling Tinggi”, “Posisi 10 Bank Terbesar RI Tak Tergoyahkan”, “Tak Menyerah, KPPU Kejar Bukti Praktik Kartel Perbankan”, “BI: Bunga Kredit Tinggi, Bank RI Belum Efisien”. Itulah beberapa *headline* di media *online* dalam kurun waktu sebulan terakhir ini, dua *headline* pertama di *Kompas Online*, sisanya di *DetikFinance*.

Ada benang merah yang cukup menggelitik untuk dikaji, khususnya mengenai dugaan adanya kartel perbankan yang berpotensi praktik pengendalian suku bunga oleh bank. Sinyalemen pengendalian suku bunga tersebut berpotensi merugikan pasar atau nasabah bank. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pun berupaya melakukan investigasi, namun para bankir pun ramai-ramai menepis “tuduhan” tersebut.

“Bankir: Tak Ada Kartel Bunga”, “Mengumpulkan Bankir Saja Susah, Apalagi Mau Kartel”. Begitulah *headline* lain yang menunjukkan argumentasi—kalau tidak boleh dikatakan sebagai sikap reaktif dari para bankir. Sebenarnya apa yang menjadi masalah utama dengan sinyalemen tersebut, atau lebih tepatnya siapa yang dirugikan andaikan bank berhasil mengeruk keuntungan tinggi?

Pemetik Bunga

Saat ini perbankan Indonesia secara umum masih sangat mengandalkan *Interest Margin*, yaitu perbedaan antara biaya dana yang harus dikeluarkan bank untuk dana yang berhasil dikumpulkannya dari masyarakat (*source of fund*) dengan keuntungan bunga yang diperoleh bank dari kegiatan penyaluran dana (*use of fund*), misalnya dari aktiva produktif bank. *Interest Margin* pun akan tinggi jika biaya dana bank adalah rendah, dengan menekan tingkat suku bunga simpanan, namun keuntungan bank tinggi, misalnya dengan tingkat suku bunga pinjaman tinggi.

Perilaku penetapan “harga jual” (tingkat suku bunga rata-rata dari penyaluran dana) yang tinggi dengan menekan biaya produksi (*cost of fund*) serendah-rendahnya merupakan perilaku bisnis yang bisa diterima untuk lembaga yang *profit oriented*. Sesederhana itulah prinsip bisnis perbankan. Jadi tidak heran jika NIM (*Net Interest Margin*) perbankan nasional tergolong tinggi, yaitu mencapai 5,8 persen per Desember 2010, padahal negara ASEAN lainnya tidak sebesar itu. Per Desember 2010 kelompok bank yang menunjukkan nilai NIM tertinggi berturut-turut adalah kelompok Bank Umum Non Devisa (9,10%), BPD (8,74%), dan Bank Persero (6,11%), sedangkan bank campuran dan bank asing justru mempunyai NIM terendah yaitu 3,83% dan 3,54%. Patut diduga bahwa perbedaan angka-angka tersebut menunjukkan perbedaan perilaku penetapan suku bunga dan tingkat efisiensi perbankan.

Hebatnya, perbankan nasional masih dapat memperoleh keuntungan bersih yang relatif besar ketika perbankan nasional dianggap tidak efisien. Kita kutip lagi *headline* yang terkait dengan efisiensi perbankan nasional yang rendah,

“BI: Bunga Kredit Tinggi, Bank RI Belum Efisien” (*Kompas.com*, 17/03/2011). Inefisiensi perbankan di Indonesia terlihat dari tingginya rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). BI mencatat, rasio BOPO perbankan Indonesia 88,6 persen. Bandingkan dengan BOPO bank di Malaysia yang hanya 40 persen dan Filipina 74 persen.

“Salah satu penyebab tingginya BOPO adalah biaya gaji yang tinggi,” kata Direktur Direktorat Penelitian dan Perbankan BI Wimboh Santoso (*Kompas.com*, 17/03/2011). Namun para bankir kembali membela diri, “Perbanas: Tak Masalah Gaji Bankir Besar, Asal Kinerja Bagus” (*Detik.com*, 18/03/2011). Kinerja bankir bagus, keuntungan bank tinggi, namun mengapa kondisi tersebut menjadi sorotan? Mari kita lanjutkan diskusinya dengan mendalami perspektif kepentingan Bank Indonesia, bank, atau para bankir, serta di sisi lain dari perspektif kepentingan masyarakat.

Dominasi Sepuluh Besar

“Saya melihat terdapat sesuatu permasalahan besar, yaitu dalam kondisi likuiditas perbankan berlebih, peran perbankan dalam pertumbuhan ekonomi masih rendah. Rasio kredit terhadap PDB pada 2010 hanya sekitar 26,1 persen, hanya sedikit meningkat dari 25,7 persen pada 2009,” kata Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution dalam acara Pertemuan Tahunan Perbankan di Jakarta (*Kompas.com*, 17/03/2011).

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa kontribusi perbankan nasional terhadap perkembangan ekonomi masih rendah, atau dilihat dari prinsip perbankan, fungsi intermediasi perbankan belum berjalan optimal. Kita lihat angka atau statistik perbankan terlebih dahulu sebagai gambaran perkembangan perbankan nasional.